



## **GEPOLITIK LAUT CINA SELATAN: STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS POLITIK WILAYAH ASEAN**

### **GEPOLITICS OF THE SOUTH CHINA SEA: INDONESIA'S DIPLOMATIC STRATEGY IN MAINTAINING THE POLITICAL STABILITY OF THE ASEAN REGION**

OGI NANDA RAKA ADE CANDRA NUGRAHA

Psikologi, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Oginanda@yahoo.com, 089661069836

**Abstrak:** Stabilitas Geopolitik Laut China Selatan terancam dari berbagai gangguan seperti klaim daerah atau kawasan di Laut China Selatan oleh beberapa negara ASEAN maupun Non ASEAN. Penelitian ini membahas bagaimana strategi Diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik kawasan ASEAN, khususnya Laut China Selatan dengan menganalisa pemahaman mengenai konflik Laut China Selatan dan kekuatan Republik Rakyat Tiongkok di kawasan tersebut. Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa. Sumber kepustakaan sebagai data primer. Ancaman Laut China Selatan ialah tindakan klaim wilayah secara sepihak oleh beberapa negara dikarenakan geografi, jalur pelayaran yang strategis dan sumber daya alam yang tekandung, hingga pihak Republik Rakyat Tiongkok melakukan unjuk diri dengan pernyataan One Belt One Road dan meningkatkan kekuatannya dikawasan tersebut. Diselenggarakannya Multilateral Naval Exercise Komodo sebagai Second Track Diplomacy setiap 2 tahun sekali dari tahun 2014 - 2022 mendatang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas politik diwilayah masing masing negara yang mengikuti kegiatan tersebut, khususnya negara ASEAN.

**Kata Kunci :** Diplomasi, Geopolitik, Laut China Selatan

**Abstract :** *The geopolitical stability of the South China Sea is threatened by various disturbances such as territorial or regional claims in the South China Sea by several ASEAN and non-ASEAN countries. This research discusses how Indonesia's diplomacy strategy in maintaining political stability of the ASEAN region, especially the South China Sea by analyzing understanding the South China Sea conflict and the strength of the People's Republic of China in the region. Descriptive research methods of analysis with qualitative approaches, by collecting data, processing and analyzing. Library sources as primary data. The South China Sea threat is a unilateral act of territorial claim by several countries due to geography, strategic shipping lanes and damming natural resources, until the People's Republic of China rallied with the One Belt One Road statement and increased its military power in the area. The holding of Multilateral Naval Exercise Komodo as Second Track Diplomacy every 2 years from 2014 - 2022 is expected to increase political stability in the regions of each country that participates in the activity, especially ASEAN countries.*

**Keywords :** *Diplomacy, Geopolitics, South China Sea*

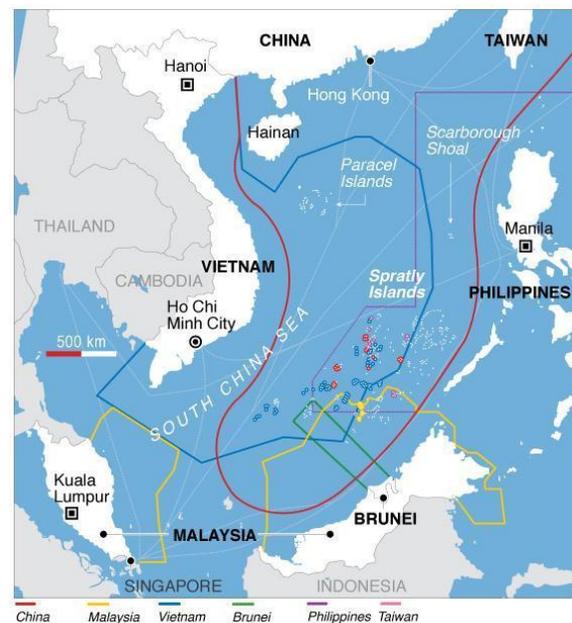
## PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan adalah laut semi tertutup yang berbatasan langsung dengan Negara Vietnam di sisi barat, dengan Filipina, Malaysia dan Brunei di sisi timur, dan Indonesia dan Malaysia, di sisi selatan, serta oleh RRT dan Taiwan di sisi utara. Dimana luas totalnya sekitar 550-650 mil laut (lebar) dan 1200 mil laut (panjangnya). (Beckman, 2013). Beberapa aktivitas Geopolitik dan klaim atas wilayah dari berbagai Negara sepanjang kawasan LCS menimbulkan ketidakstabilan situasi Politik di kawasan tersebut, dimana klaim tersebut bersinggungan dengan kedaulatan dan hak berdaulat dengan Negara - Negara lain.

Dengan adanya Klaim Nine Dash Line Beberapa negara anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang terlibat konflik dengan Cina adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. NDL dimana salah satu garisnya bersinggungan atau mengalami tumpang tindih dengan ZEE (Zona Eksklusif Ekonomi) dan Landas Kontinen Indonesia di area Laut Natuna bagian Utara, Kepulauan Riau. Klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengenai NDL di dasari oleh sejarah, hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu. Dengan luas wilayah tumpang tindih dengan Laut Natuna Utara

seluas 83.315,62 kilometer persegi (Octavian, 2018).

Pada United Nations Convention Law of The Sea, memuat antara lebar laut wilayah yaitu 12 mil dari pantai, Rezim negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil, tentu saja klaim NDL dari pihak RRT sangat bertentangan dengan konvensi yang sudah berlaku sehingga atas klaim tersebut menimbulkan ketidakstabilan Geopolitik kawasan ASEAN, khususnya Laut Cina Selatan.



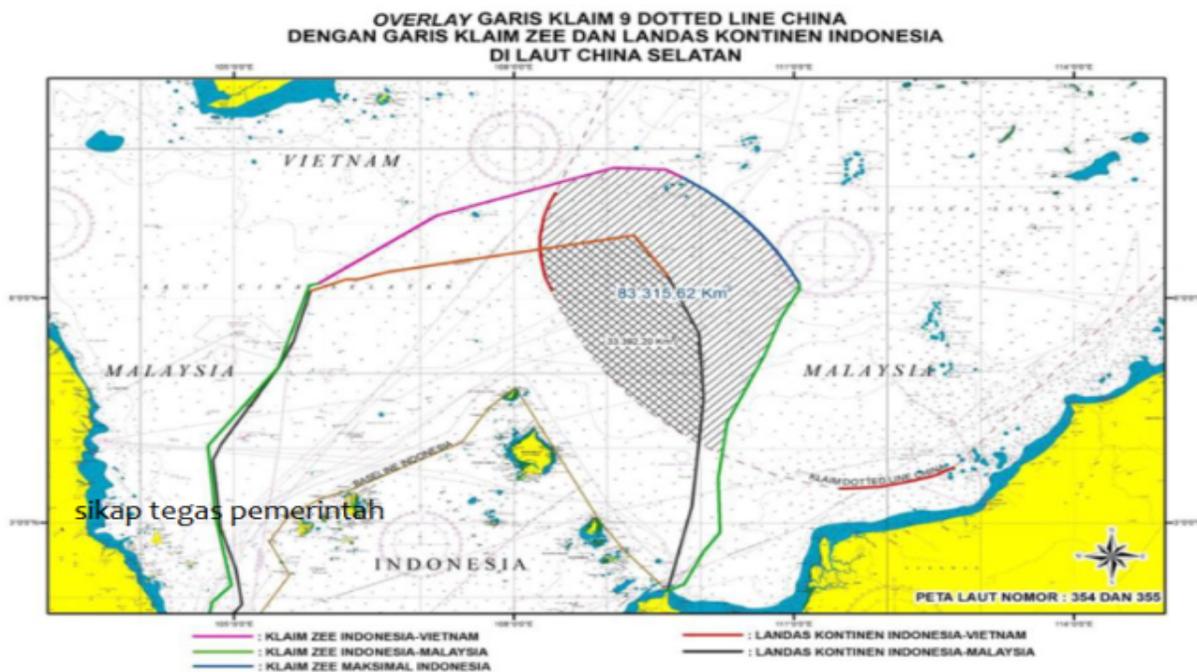
Gambar 1: Nine Dash Line  
Sumber : VOA News (2012)

Adapun juga dari beberapa Negara Anggota ASEAN yang melakukan klaim secara sepihak. Filipina, Tiongkok, dan Taiwan atas Scarborough Shoal. Vietnam, Tiongkok, dan Taiwan atas perairan di barat Kepulauan Spratly.

Beberapa atau semua pulau diperebutkan oleh Vietnam, Tiongkok, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Kepulauan Paracel diperebutkan oleh RRC/ROC dan Vietnam. Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam atas perairan di Teluk Thailand. Singapura dan Malaysia atas perairan sekitar Selat Johor dan Selat Singapura. Meskipun demikian tidak menjadi alasan untuk tidak memperdulikan kondisi dan situasi area LCS, dikarenakan beberapa Negara ASEAN juga memperlihatkan aktivitas klaim secara sepihak

beberapa. Maka dari itu, Negara Indonesia perlu melakukan tindakan Diplomasi antar Negara ASEAN maupun diluar ASEAN untuk tetap menjaga situasi stabilitas Politik wilayah ASEAN, khususnya LCS agar tidak terjadi kemungkinan terburuk yaitu perang terbuka di wilayah LCS.

Penulisan/penelitian ini fokus pada (1) memahami konflik kawasan LCS yang diperebutkan, (2) Menaganalisa kekuatan posisi RRT di LCS, (3) Kebijakan atau Strategi Diplomasi Indonesia dalam menjaga Stabilitas Politik



Gambar 2. Peta Ilustrasi Overlay Garis Klaim NDL Cina dengan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia.

*Sumber : Sopsal (2017).*

## **Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Penulis menggunakan metode tersebut dikarenakan maksud penelitian ini ditujukan untuk mengetahui potensi Geopolitik LCS, strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik, serta potensi konflik/atau perang terbuka kawasan LCS melihat kondisi stabilitas Geopolitik di kawasan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Memahami Konflik LCS**

**Tumpang Tindih Klaim dan Potensi SDA Dan Ekonomi** - bahwasanya kawasan LCS juga mengandung beberapa Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi yang sangat melimpah, seperti beberapa Negara wilayah LCS melakukan tindakan saling klaim wilayah yang masih dipersengketakan.

1) Kepulauan Sparty (Klaim oleh RRT, Taiwan, and Vietnam)

Pada tahun 1970 Filipina mulai mengeksplorasi daerah tersebut dan baru pada tahun 1976 mereka menemukan cadangan gas alam. Perusahaan AS Sterling Energy memenangkan waralaba pada tahun 2002, dan perusahaan Inggris Forum Energy mengakuisisi waralaba pada tahun 2005 dan menjadi operator. Namun, Republik Rakyat Cina telah kebarat-baratan dengan ini dan memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan, sejauh ini konsesi belum membuat kemajuan. kondisi di Spratly sebagian besar steril, tidak dapat dihuni dan hanya memiliki sedikit sumber daya. Namun, kondisi ini secara strategis penting. Meskipun sulit untuk secara akurat memperkirakan jumlah total minyak dan gas di Laut Cina Selatan karena sengketa wilayah yang sedang berlangsung dan kurangnya kegiatan eksplorasi, Administrasi Informasi Energi (EIA) dari negara bagian AS memperkirakan bahwa ada sekitar 11 miliar barel minyak. 190 triliun kaki kubik cadangan dan cadangan gas alam di Laut Cina Selatan. (EIA, 2013)

China, Taiwan dan Vietnam mendasarkan klaim masing-masing berdasar pada hak-hak bersejarah atas kepulauan Spratly, sementara Filipina, Malaysia dan Brunei mendasarkan

klaim masing-masing pada ketentuan kedekatan geografis di bawah UNCLOS.

## 2) Kepulauan Paracel (Klaim oleh RRT dan Vietnam)

Terletak di wilayah barat laut Laut Timur, Kepulauan Paracel berjarak sekitar 185 mil laut timur pantai Vietnam dan 165 mil laut tenggara pulau Hainan China. Atol dataran rendah ini terdiri dari dua sub-rantai utama: kelompok Cres Cent di barat dan kelompok Amphitrite di utara, dengan atol terisolasi yang tersebar jauh ke laut. Kepulauan Paracel terbentang sejauh 105 mil laut dari Pulau Pohon ke timur laut ke barat daya Pulau Triton dan 100 mil laut ke barat laut North Reef ke tenggara Herald Bank. Di sekitar Paracels, kedalaman laut bervariasi dari 1000 hingga 2000 meter (m). Terlepas dari perbedaan komposisi, kedekatan fisik, dan bayangan nyata dari fitur-fitur ini, perairan dan dasar laut di sekitarnya memainkan peran yang sangat penting dalam perselisihan di wilayah kepulauan Hoang Sa.

Klaim energi hidrokarbon Laut Cina Selatan adalah bagian lain dari sengketa kesetaraan maritim ini. Laut Cina Selatan telah dijuluki "Teluk Persia kedua" atau "hidrokarbon El Dorado" karena potensinya yang kaya, mengutip beberapa sumber, seperti Central Intelligence Agency World Factbook (CIA), selain berspekulasi tentang kemungkinan minyak atau alam. Serangan gas di sekitar Kepulauan Paracel.

Namun, Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (USEIA) pada tahun 2013 memberikan sedikit informasi tentang kemungkinan cadangan minyak kurang dari 0,1 triliun kaki kubik gas alam di wilayah tersebut. Analisis geologi dasar USEIA menunjukkan bahwa sebagian besar potensi hidrokarbon konvensional terletak di daerah pesisir dangkal di sekitar Laut Cina Selatan, bukan di perairan yang lebih dalam seperti di sekitar Kepulauan Paracel, sehingga menimbulkan keraguan apakah hidrokarbon konvensional dapat ekonomis. dapat dipulihkan di sana. . Meskipun Paracels tidak memiliki bentuk hidrokarbon lain, tes awal menjanjikan sejumlah besar metana hidrat, suatu bentuk karbon yang diyakini lebih kuat daripada batu bara, minyak bumi, dan gas lainnya. Karena keterbatasan teknologi dan biaya ekstraksi yang tidak kompetitif dibandingkan dengan gas alam konvensional, metana hidrat tidak ekonomis saat ini, tetapi mewakili "salah satu reservoir bahan bakar berbasis karbon terbesar di dunia" dalam beberapa dekade mendatang. Untuk Vietnam dan Cina, ekonomi yang kekurangan energi tetapi berkembang dalam masyarakat dengan sejarah panjang dan budaya yang toleran, metana hidrat bisa menjadi harta karun di masa depan jika ladang minyak Gas yang ditemukan di tempat lain di Laut Cina Selatan tidak diangkut di sekitar Kepulauan Paracel. (Bouchat, 2014)



3) Scarborough Shoal (Klaim oleh Filipina, Tiongkok, dan Taiwan)

Terletak 220 km dari Provinsi Zambales (Pulau Luzon, Filipina), Scarborough adalah atol terbesar di Laut Cina Selatan, di mana pada saat air pasang atol tenggelam bersama dengan beberapa batu karang/karang di Laut. tentang implementasi UNCLOS tentang hukum laut oleh ketiga penuntut tidak kunjung terealisasi. Sumber daya alam hanya 4.444 daerah yang nelayannya melaut karena sumber daya perairannya cukup melimpah.

Pensiunan Hakim Agung Filipina Antonio Carpio memperkirakan bahwa Beijing akan mengubah Beting Scarborough, yang diklaim oleh Filipina tetapi diduduki oleh China, menjadi pulau buatan kedelapan di Laut Cina Selatan sebelum Presiden Duterte meninggalkan kantor pada 2022. Mr Carpio menyatakan bahwa China harus membangun fasilitas militer di Laut Cina Selatan. Scarborough Shoal sebagai radar, peralatan komunikasi, dan landasan pacu sebelum mereka dapat membangun Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) lengkap di atas Laut Cina Selatan. Namun, China tidak mungkin memulihkan Beting Scarborough sebelum akhir masa jabatan Duterte karena kerusakan parah yang akan terjadi pada hubungan Tiongkok-Filipina, meskipun agak sulit dalam hubungan tersebut. Posisi Manila, tetapi telah meningkat secara signifikan sejak 2016.

Selain itu, setiap langkah China untuk mengirim armada kapal pengerukan ke Scarborough Shoal kemungkinan akan mendapat tanggapan. Tindakan paksa dari Amerika Serikat, yang mungkin termasuk intervensi Angkatan Laut AS untuk mencegah penyerahan dalam kondisi yang akan terjadi. (Storey, 2020)

4) Laut Natuna Utara (Indonesia dan RRT)

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), Indonesia memiliki hak hukum atas wilayah Natuna Utara, berdasarkan ZEE dan landas kontinennya. Tidak hanya UNCLOS 1982, ZEE dan wilayah Indonesia dipastikan mengakui kontrak pengelolaan migas dengan rezim hukum Indonesia. China menegaskan klaimnya atas wilayah utara Laut Natuna karena basis Hisotri adalah NDL. Kepulauan Natuna memiliki kepentingan strategis dalam dua hal. Pertama, mereka adalah salah satu kabupaten atau kabupaten terkaya di Indonesia dalam hal sumber daya alam lepas pantai, termasuk cadangan minyak dan gas dan penangkapan ikan di perairan mereka. Menurut salah satu sumber, lapangan gas East Natuna (sebelumnya dikenal sebagai blok Natuna D-Alpha), adalah lapangan gas alam besar yang terletak di utara (dan dengan demikian, menempati bagian dari LCS) dan ditemukan pada tahun 1970, memegang sekitar 500 juta barel minyak mentah dan cadangan gas dari 222 triliun kaki kubik gas alam cadangan.

Blok lainnya adalah lapangan West Natuna yang memasok gas ke Singapura. Operasi penangkapan ikan diharapkan menghasilkan sekitar 500.000 ton per tahun, meskipun penduduk setempat hanya dapat mengangkut sepertiga dari produk karena penggunaan metode tradisional dan kurangnya infrastruktur dan fasilitas, fasilitas pengolahan yang sesuai, dan cenderung ditangkap terutama untuk subsisten. Selain itu, wilayahnya sangat beragam, misalnya pada tahun 2002, 3.000 spesimen tumbuhan dan hewan telah diidentifikasi dan dikatalogkan oleh ekspedisi ilmiah. Sehingga ada kecenderungan untuk menggambarkan Natuna sebagai Galapagos-nya Indonesia. (Suryadinata, 2017)

bagian pesisir. EIA memperkirakan ada sekitar 11 miliar barel cadangan minyak dan 190 triliun kaki kubik dari 4.444 cadangan gas alam di Laut Cina Selatan. Angka-angka ini mewakili cadangan terbukti dan kemungkinan, membawa mereka lebih dekat ke perkiraan premium. Misalnya, firma konsultan energi Wood Mackenzie memperkirakan bahwa lautan hanya mengandung 2,5 miliar barel minyak yang setara dengan cadangan minyak dan gas terbukti. Selain cadangan terbukti dan terkira, Laut Cina Selatan mungkin mengandung minyak tambahan di daerah yang belum dijelajahi. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menganalisis potensi ladang minyak dan gas konvensional yang belum dieksplorasi di beberapa provinsi geologi di Asia Tenggara pada tahun 2010 sebagai bagian dari Proyek Penilaian Sumber Daya Minyak, Gas Global. Studi ini mencakup area substansial Laut Cina Selatan, yang menurut perkiraan USGS mungkin mengandung antara 5 dan 22 miliar barel minyak dan antara 70 dan 290 triliun kaki kubik gas dalam sumber daya yang belum dijelajahi (tidak termasuk Teluk Thailand dan daerah lainnya). berbatasan dengan Laut Timur). Cina Selatan). Sumber daya tambahan ini saat ini tidak dianggap sebagai cadangan komersial karena tidak diketahui seberapa ekonomisnya untuk dieksploitasi. Karena penilaian USGS tidak memeriksa seluruh area, sumber daya yang



Gambar 3: SDA Natuna Utara  
Sumber : Moeldoko (2020)

Sulit untuk menentukan jumlah minyak dan gas alam di Laut Cina Selatan karena sengketa wilayah dan keadaan eksplorasi yang belum dieksplorasi. Sebagian besar ladang yang ditemukan saat ini terkonsentrasi di bagian laut yang tak terbantahkan, dekat pantai negara

belum dijelajahi mungkin lebih besar. Pada bulan November 2012, Perusahaan Minyak Nasional China (CNOOC) memperkirakan bahwa daerah tersebut menyimpan sekitar 125 miliar barel minyak dan 500 triliun kaki kubik gas alam dalam sumber daya yang belum dieksplorasi, meskipun studi Independen belum mengkonfirmasi angka-angka ini.

**Jalur Pelayaran Strategis** - Sekitar 14 juta barel minyak mentah melewati Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand setiap hari, hampir sepertiga dari pengiriman minyak global. Lebih dari 90% dari total arus berasal dari Selat Malaka, sedangkan sisanya berasal dari perdagangan di Asia Tenggara. Pertama, sekitar 15,2 juta barel minyak per hari melewati Selat Malaka pada 2011, jalur laut terpendek antara pemasok Afrika dan Teluk Persia dan pasar Asia. Sebagian besar minyak mentah yang mencapai Selat (1,4 juta barel per hari) dikirim ke pelabuhan di Singapura dan Malaysia, di mana diproses dan dikirim kembali sebagai produk minyak olahan. Selain itu, aliran yang tersisa (12,8 juta b/d) berlanjut melalui Laut Cina Selatan ke Cina dan Jepang (masing-masing 4,5 dan 3,2 juta b/d), dua konsumen energi utama terbaik di Asia. Akhirnya, sekitar 15% minyak yang transit melalui Laut Cina Selatan berlanjut ke Laut Cina Timur, terutama ke Korea Selatan (lihat tinjauan regional Laut Cina Timur). Aliran minyak mentah di Laut Cina Selatan juga

berasal dari perdagangan intra-Asia Tenggara, terutama Malaysia (0,4 juta barel per hari), ekspor minyak dari Indonesia (0,3 juta barel per hari) dan Australia (0,2 juta barel/hari). perdagangan intra-regional dibagi rata-rata antara Singapura, Korea Selatan, Jepang dan Cina, dengan jumlah yang lebih kecil pergi ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sekitar 0,2 juta barel minyak mentah per hari mengalir ke selatan melalui Selat Lombok ke Australia dan Samudra Pasifik.



Gambar 4. Arus Perdagangan Minyak Mentah  
Sumber : Energy Information Administration

EIA memperkirakan bahwa sekitar 6 triliun kaki kubik dari 4.444 gas alam cair, atau lebih dari setengah gas alam cair global, melewati Laut Cina Selatan pada tahun 2011. Sekitar 56% dari volume tersebut (3.400 miliar kaki kubik) terus diimpor. Di Jepang, 24% ke Korea Selatan (1,4 triliun kaki kubik), 19% ke China dan Taiwan (masing-masing 0,6 dan 0,6

triliun kaki kubik) dan sisanya ke negara-negara lain di kawasan. Eksportir laut terbesar adalah Qatar dengan 1,2 Tcf. Bersama dengan itu, Qatar, Malaysia, Indonesia dan Australia menyumbang hampir 75% dari total ekspor gas alam cair ke wilayah tersebut. Setelah krisis Fukushima, Jepang meningkatkan impor. Pada paruh pertama tahun 2012, wilayah Laut Cina Selatan menyumbang sekitar 58% dari perdagangan LNG global. Mengingat meningkatnya permintaan gas alam di Asia Timur, EIA memperkirakan bahwa pangsa perdagangan gas alam cair global di Laut Cina Selatan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Sebagian besar pasokan baru akan datang dari Selat Malaka, meskipun negara-negara seperti Singapura dan Indonesia berinvestasi di pabrik regasifikasi baru yang didukung oleh ladang gas di Laut Cina Selatan untuk meningkatkan kapasitas ekspor mereka, gas alam cair. (US EIA, 2013)

South China Sea major LNG trade flows, 2011



Gambar 5. Arus Perdagangan LNG

Sumber : Energy Information Administration

### Kekuatan Posisi RRT di LCS

Kemampuan baru China di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah menjadikannya tidak ada duanya dan dengan daya tawar yang sangat besar, menjadikan baik tetangga utamanya maupun Amerika Serikat satu-satunya negara adidaya yang memenangkan perang, perang dingin sebelumnya yang ditakuti. Kemampuan Presiden Xi dalam menghadapi pandemi Covid19 meletakkan dasar bagi pencapaian baru China dalam memimpin dunia, menggantikan posisi kepemimpinan AS yang menurun di kawasan lain secara bersama-sama.

Inisiatif Sabuk dan Jalan China (juga dikenal sebagai One Belt, One Road (OBOR)) adalah salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi Presiden Xi yang paling ambisius. Ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan ekonomi Beijing melalui program luas pembangunan infrastruktur di antara tetangga China. Banyak analis kebijakan luar negeri melihat langkah itu terutama melalui lensa geopolitik, melihatnya sebagai upaya Beijing untuk mendapatkan pengaruh politik atas tetangganya. Ini tidak diragukan lagi merupakan bagian dari perhitungan strategis Beijing. (Cai, 2017) Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh China di dunia khususnya posisinya di kawasan Laut Cina Selatan sangat strategis, sepadan

dengan pemulihan ekonomi yang pesat di bawah arahan China. Sejumlah negara, khususnya negara-negara ASEAN, memiliki hubungan investasi dengan China dalam hal infrastruktur.



Gambar 6. Investasi Infrastruktur China

*Sumber : Asia Insurance Review (2017)*

Strategi pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) China bertujuan untuk membangun konektivitas dan kerja sama di enam koridor ekonomi utama termasuk China dan: Mongolia dan Rusia; Eropa - negara-negara Asia; Asia Tengah dan Barat; Pakistan; negara-negara lain di anak benua India; dan Indocina. Asia membutuhkan investasi infrastruktur senilai \$26 triliun pada tahun 2030, (Asian Development Bank, 2017) dan Cina pasti dapat membantu menyediakan sebagian dari itu. Investasinya, dengan membangun infrastruktur, berdampak positif bagi negara-negara yang terlibat. Win-win merupakan fitur BRI yang juga akan membantu mengembangkan pasar produk China dalam

jangka panjang dan mengurangi kelebihan kapasitas industri dalam jangka pendek. BRI mengutamakan hardware (infrastruktur) dan pendanaan terlebih dahulu. (OECD, 2018)

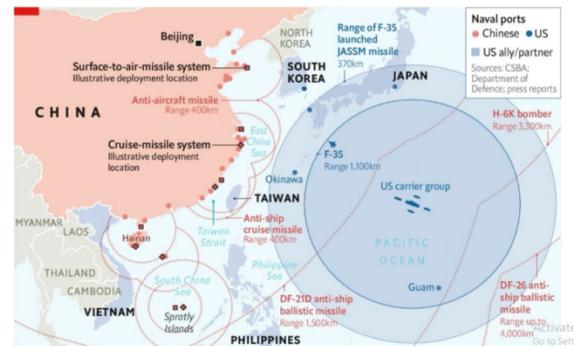
Tidak hanya dari segi ekonomi dan investasi, tetapi juga secara militer, China juga menjadi kekuatan baru dan berpengaruh di Laut China Selatan, misalnya. Beberapa pengamat berpendapat bahwa tindakan China di Laut China Selatan telah membantu China mendapatkan posisi yang lebih dominan atau dominan di Laut China Selatan. Misalnya, Laksamana Angkatan Laut AS Philip Davidson, dalam menanggapi pertanyaan kebijakan tindak lanjut dari Komite Angkatan Bersenjata Senat untuk sidang pada 17 April 2018, di hadapan komite untuk mempertimbangkan pencalonan, termasuk penunjukan Davidson menjadi Komandan Komando Pasifik AS (PACOM), berpendapat bahwa “China sekarang dapat mengendalikan Laut China Selatan di bawah semua skenario, kecuali perang dengan Amerika Serikat.” . (wawancara dengan Laksamana Philip Davidson, 2018).

Mencermati pernyataan salah satu laksamana AS tersebut, tidak dapat dipungkiri dan fiktif bahwa Laut China Selatan dapat dikuasai atau dikuasai oleh Republik Rakyat China secara geopolitik. Dalam beberapa tahun terakhir, militer Republik Rakyat Tiongkok telah mengalami peningkatan pesat.

Sejak China mengklaim kedaulatan luas atas Laut China Selatan (LCS) pada tahun 2009, wilayah tersebut secara bertahap menjadi termiliterisasi ketika Beijing berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan klaimnya. Penuntut maritim utama lainnya dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terutama Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Filipina, telah berusaha untuk memodernisasi kemampuan angkatan laut dan pertahanan mereka, garis pantai mereka untuk mempertahankan status quo di Laut Cina Selatan. Namun, peningkatan mereka jelas sangat kecil dibandingkan dengan pencapaian militer Beijing yang spektakuler. Faktanya, hanya Vietnam yang menonjol dari saudara-saudaranya di ASEAN dalam kedalaman dan keluasan modernisasi militernya untuk mengimbangi jejak militer China yang terus berkembang. Namun, Hanoi masih berada di posisi kedua, jauh dari China. (Grossman, 2019)

Hingga saat ini, Beijing telah memperkuat beberapa pangkalan operasi maju dengan rudal jelajah anti-kapal (ASCM) dan rudal permukaan-ke-udara (SAM) serta penyimpanan bawah tanah, hanggar, radar, dan susunan sensor. Pada akhir Juni 2019, Beijing menguji rudal balistik anti-kapal (ASBM) di dekat Kepulauan Spratly yang disengketakan untuk menunjukkan kemampuan China yang berkembang untuk melawan intervensi militer

guna menghalangi Amerika Serikat dan sekutunya. (Panda, 2019)



Gambar 7. Peta Kemampuan China melawan intervensi militer

Sumber : (Widjajanto 2020)

Pentagon lebih lanjut mencatat bahwa komando PLA yang bertanggung jawab atas operasi LCS, yang dikenal sebagai Angkatan Laut Teater Selatan, mempertahankan dalam inventarisnya empat kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir (SSBN), dua kapal selam serangan bertenaga nuklir (SSN), 16 kapal selam serangan bertenaga diesel, 11 kapal perusak (DDG), 19 fregat (FFG), 11 korvet (FFL), tiga dermaga transportasi amfibi (LPD), sepuluh kapal pendarat tank (LST), Sembilan kapal pendaratan menengah, dan 24 kapal patroli rudal. (Department of Defense, 2018)

Modernisasi Rencana juga mencakup penyebaran berbagai kemampuan anti-akses/penolakan area (A2AD) seperti ASMM, ASBM, Ground Attack Cruise Missiles (LACM) dan teknologi bantuan ranjau serta ISR



yang menyertainya. (Annual Report Congress, 2018) Tentu saja, hal ini tidak membuat Amerika Serikat tinggal diam sebagai Negara Adidaya yang dapat mengatur separuh dunia, terlihat pada beberapa pangkalan Militer AS di beberapa Negara di Laut China Selatan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina dan Armada Kapal Induk Amerika Serikat di perairan Pasifik.

Namun, Indonesia membuka pangkalan militer baru pada akhir 2018 di pulau Natuna Besar di lepas pantai Kalimantan, dekat ujung paling selatan klaim China atas Laut China Selatan, tampaknya untuk menantang Beijing, meskipun 'masih memperdebatkannya. (SCMP News, 2019)

Meskipun banyak nelayan yang bentrok dengan China dan lainnya di LCS, baru pada musim panas 2019 Indonesia memperkuat penjaga pantainya untuk fokus pada tantangan ini. Di bidang penerbangan, Indonesia masih menyimpan pesawat multirole Su30MK2 dan berharap untuk mendapatkan pesawat tempur Su35 meskipun ada kemungkinan sanksi AS untuk meringankan masalah perawatan F16 dan ketidakmampuan membeli F15. Jakarta melanjutkan untuk memperoleh Sistem SAM Lanjutan Kongsberg Norwegia (NASAMS), Sistem Pertahanan Udara Jarak Menengah, serta Sistem Skyshield Oerlikon - sistem SAM jarak pendek yang mempertahankan daratan Indonesia, tetapi pada akhirnya dapat

dikerahkan ke Pulau Natuna. (Defense Industry Daily, 2018)

### **Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia**

Melihat potensi LCS secara Geografi, SDA dan Ekonomi, tentu saja banyak wilayah atau kawasan di LCS diperebutkan/dipersengketakan oleh beberapa Negara ASEAN dan Asia Timur. Maka dari itu, Indonesia sebagai penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) yang ditandatangani di Senggigi, Lombok pada 12 September 2003 menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban kawasan ASEAN khususnya LCS, dengan cara melaksanakan Diplomasi Pertahanan antar Negara ASEAN maupun luar lingkup ASEAN.

Keberhasilan dalam menciptakan dan memantapkan stabilitas geopolitik di Asia Tenggara telah menjadi tujuan utama ASEAN sejak berdirinya deklarasi tersebut hingga saat ini. Salah satunya adalah Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Dan pada KTT ke-25, ASEAN menyambut hangat keinginan berbagai pihak non-ASEAN untuk bergabung dalam TAC, dan ASEAN menganggap penting untuk mensinergikan berbagai proposal keamanan di kawasan. (Kementerian Luar Negeri, 2014)

Dalam Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020, adalah pembangunan pertahanan tahunan, yang ditetapkan setiap lima tahun



sekali dan diperlukan untuk mengelola seluruh sumber daya nasional dan infrastruktur nasional untuk mencapai tujuan pertahanan negara tujuan pembangunan nasional, berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Global (Sishankamrata), tujuan politik yang dimaksud pada poin 3 adalah: untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan regional dari segi konsep. Konsep sentral ASEAN, memperkuat kerja sama pertahanan dengan mengutamakan negara tetangga yang berbatasan langsung, kepada negara-negara Perhimpunan Tenggara. Asia. Negara-negara (ASEAN) dan kawasan Pasifik Selatan serta negara-negara yang memiliki hubungan kerja sama pertahanan dengan Indonesia untuk kepentingan nasional. Memperkuat kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama yang berkelanjutan untuk memperkuat arsitektur keamanan regional, khususnya di Laut Cina Selatan. (Wibowo, 2020)

South China Sea Declaration of Action (DoC) telah sangat berhasil dalam menyelesaikan sengketa, namun pendekatan ini belum memberikan penyelesaian sengketa jangka panjang. Pendekatan bilateral yang diprakarsai oleh China dalam situasi lain di tingkat *First Track Diplomacy* juga memiliki keterbatasan. Pendekatan ini, yang cenderung memecah belah dan mendominasi negara-negara kawasan, melayani kepentingan

jangka panjang China. Kedua, kebijakan China yang semakin keras mengenai perselisihan ini akan bertentangan dengan pendekatan bilateralnya. Memikirkan batas-batas diplomasi jalur pertama yang dipimpin oleh ASEAN, Indonesia dan China adalah pendekatan yang mungkin untuk dihadapi, jika mengacu pada teori diplomasi multi-jalur, ada banyak kemungkinan potensi jika dikaitkan dengan dan memberdayakan potensi lain. . tingkat diplomatik yang ada. Dalam hal ini, *Second Track Diplomacy* merupakan salah satu potensi untuk mendukung dan menutupi keterbatasan yang ada pada diplomasi lini pertama. (Dipua, 2020)

Anggota ASEAN telah menunjukkan kesediaan mereka untuk mempromosikan kerja sama mereka secara lebih khusus melalui konsep Komunitas ASEAN (AC). Visi ini dimaksudkan terutama untuk memfasilitasi interaksi ekonomi antara Negara-negara Anggota serta interaksi politik, keamanan dan sosial budaya. Hal inilah yang menjadi dasar pelatihan AC pada tahun 2015. AC juga akan mencakup pengembangan sektor pertahanan. Meskipun negara-negara ASEAN berkomitmen untuk lebih aktif bekerja sama satu sama lain, masih ada ruang untuk perbaikan di bidang ini. Beberapa ketegangan antara Negara-negara Anggota telah ada sepanjang sejarah. Saat ini, konflik di Laut Timur yang melibatkan enam



penuntut, termasuk banyak negara anggota ASEAN, menjadi fokus perhatian. Semua negara ASEAN harus mulai menyesuaikan sistem dan platform militer mereka masing-masing. Ini tidak berarti kehilangan kemampuan asli mereka, tetapi akan membutuhkan sistem dan platform yang lebih terintegrasi dan saling berhubungan yang dapat membantu organisasi mengatasi tantangan internasional, ruang dan keamanan di kawasan selama bertahun-tahun yang akan datang.

Beberapa isu penting seperti ancaman non-tradisional serta titik kritis seperti Laut Cina Selatan dan Selat Malaka dapat mengharapkan perhatian lebih dari semua negara ASEAN. Interoperabilitas militer antara Negara-negara Anggota sangat penting, mungkin memerlukan sistem pendidikan dan pelatihan yang terpadu, dan sampai batas tertentu akan memperkuat persaudaraan antara para pemimpin dan identitas kolektif di antara Negara-negara Anggota. (Wenas Inkriwang 2014).

Latihan Angkatan Laut Multilateral Komodo (MNEK) adalah kegiatan diplomasi maritim Indonesia yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kerjasama dengan angkatan laut mitra dalam operasi militer dan non-militer, seperti bantuan penyelamatan bencana dan evakuasi medis. (Marsetio, 2014) Latihan Komodo dimaksudkan untuk mempersiapkan diri mendukung perdamaian

dan menjaga stabilitas di kawasan dan di seluruh dunia. Salah satu kegiatan Diplomasi Lanjutan (STRAD) kedua yang dilakukan TNI AL adalah simposium pelatihan.

Latihan Angkatan Laut Multilateral Komodo (MNEK) 2014 diselenggarakan di Kota Batam, Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas, dengan partisipasi 4.800 personel TNI Angkatan Laut dan 27 kapal Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan China, serta negara anggota ASEAN dan negara lainnya. seperti Jepang, India, Korea, Australia, Rusia hingga Selandia Baru. Selama MNEK 2014, fokus pembahasan atau fokus utama penyelenggaraan Joint Exercise Komodo 2014 difokuskan pada penanggulangan bencana dan krisis kemanusiaan, seperti pengalaman Indonesia terhadap tsunami Aceh tahun 2004.

Selanjutnya, MNEK 2016 mempertemukan 38 marinir dari negara sahabat dan diselenggarakan di Padang Mentawai, Sumatera Barat. Kegiatan ini digabung dengan 15th Western Pacific Naval Symposium (WPNS) dan International Fleet Review (IFR) 2016 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H.Joko Widodo. Kerjasama untuk meningkatkan keamanan maritim internasional berfokus pada latihan bersama non-perang untuk memperkuat dan menyelaraskan kepentingan bersama dengan meningkatkan interoperabilitas antar angkatan



laut, untuk menjaga stabilitas keamanan maritim regional. Latihan ini memungkinkan militer secara keseluruhan, tanpa menggunakan senjata, untuk mengoordinasikan program mereka dengan lebih baik dan mampu mengatur diri sendiri dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Pada MNEK kedua, para peserta juga berkolaborasi untuk melakukan Medical Citizenship Action Program (MEDCAP) dan Technical Citizenship Action Program (ENCAP) di Siberut Island, Indonesia. (Wenas Inkriwang, 2021)

Pada MNEK kedua tahun 2016, TNI AL juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ke-15 dengan tema “Maritime Partnership for Regional Stability” Western Pacific. Semua negara mengakui bahwa mereka tidak dapat menghadapi tantangan sendirian. WPNS merupakan forum penting untuk mewujudkan kerjasama maritim regional yang membutuhkan landasan yang kokoh dan rasa saling percaya antar bangsa atau angkatan laut. WPNS juga merupakan bukti efektifitas *Second Track Diplomacy* TNI AL. Kunci keberhasilan diplomasi dalam mengembangkan rasa saling percaya terletak pada pengembangan rasa saling percaya para pihak dan kerjasama damai yang saling menguntungkan. Simposium ini merupakan salah satu contoh *Second Track Diplomacy* yang telah dilakukan selama ini dan

kemungkinan besar dapat membantu penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung dalam jalur *First Track Diplomacy*. Setidaknya ada dua alasan penting yang menjadi dasar *Second Track Diplomacy* dalam menyelesaikan konflik ini. Pertama, dengan menekankan dalam simposium ini bahwa *Second Track Diplomacy* memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk hadir dalam kapasitasnya sendiri dan menyampaikan pendapat secara terbuka, keterbukaan tanpa tekanan, seperti yang terjadi dalam *First Track Diplomacy*. Alasan kedua. pentingnya Simposium ini sebagai fasilitator potensial untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan Indonesia sendiri sebagai negara tuan rumah. Selain fakta bahwa Indonesia bukan negara pengklaim, yang membuat posisi konsiliasinya lebih dapat diterima semua pihak, Indonesia juga berperan sebagai pemimpin normatif di kawasan yang sering dipercaya untuk menengahi perselisihan.

Pada tahun 2018, MNEK kembali diselenggarakan di Lombok, NTB, dengan partisipasi 36 negara dengan tema “Kerjasama dalam merespon bencana dan masalah kemanusiaan” seperti latihan MNEK sebelumnya (Ikatan Alumni UNHAN, 2018). Disusul 51 kapal perang, 11 pesawat dan helikopter serta 5.500 tentara dari berbagai negara, termasuk negara adidaya seperti Rusia, AS, dan China. Kegiatan ini dimulai dengan



inspeksi laksamana, navigasi nasional, pameran bahari, festival budaya, Fun Run and Fun bike Mataram Komodo, food show, program budaya, city tour city, joint program, beach camp, beach village dan berlangsung hingga 4 hari. (Disbudpar NTB, 2018)

Sejak merebaknya pandemi Covid19, setiap negara berjuang menghadapi dampak virus tersebut, termasuk di bidang pertahanan. Banyak kegiatan dalam diplomasi pertahanan, mulai dari dialog strategis dan pertukaran personel hingga latihan bersama, telah dibatalkan atau ditangguhkan. (Wenas Inkriwang 2021). Termasuk kegiatan MNEK ke-4 yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan akibat pandemi Covid 19, akan dilaksanakan pada tahun 2022 di Bangka Belitung dan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta dan akan diikuti oleh 54 negara dengan tema Kegiatan untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Internasional. (Babel Inews, 2021)

Dengan diselenggarakannya kembali MNEK, diharapkan wilayah Kemaritiman Internasional, khususnya LCS dapat terjaga kondusifitasnya dikarenakan beberapa waktu belakang terjadi seperti penembakan meriam air oleh kapal penjaga pantai RRT kepada kapal pemasok filipina dan 16 Jet tempur RRT memasuk wilayah ZEE Negara Malaysia dan Sebuah kapal Survei RRT yakni Yuan Wang 6

memasuki wilayah Laut Natuna Utara dan berdiam selama 42 Jam, dengan beralih ketiga wilayah tersebut masih termasuk wilayah ND. Hal ini tidak sesuai dengan konvensi yang berlaku seperti UNCLOS 1982 dan putusan arbitrase internasional tahun 2016 dimana ND tidak memiliki dasar hukum.

### **KESIMPULAN/PENUTUP**

Melihat Diplomasi Pertahanan yang diterapkan Indonesia menggunakan *Second Track Diplomacy* dengan Multilateral Naval Exercise Komodo sebagai kegiatan latihan antar Negara ASEAN maupun Non ASEAN untuk menjaga stabilitas kemandirian dan latihan penyelamatan bencana, seharusnya stabilitas keamanan wilayah LCS terjaga, namun dikarenakan China memiliki kepentingan dan ambisi untuk menguasai wilayah tersebut dengan prinsipnya One Belt, One Road serta kegiatan militernya dengan menempatkan beberapa persenjataan di sekitar kawasan ASEAN, maka hal itu seperti tidak ada artinya, melihat dalam segi SDA dan Ekonomi wilayah LCS yang sangat melimpah. Maka pada 2022 mendatang MNEK yang akan diselenggarakan kembali setelah beberapa tahun yang lalu dari berbagai Negara menghadapi Pandemi Covid 19 dengan tema kegiatan NMEK ialah *operation to Strengthen International*



Maritime Security diharapkan dapat menjadi sebuah ilmu ataupun kesadaran bagi Negara ASEAN maupun Internasional dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing masing.

### DAFTAR PUSTAKA

- EIA Government. 2013. *South China Sea. Independent Statistic & analysis*
- EIA Government. 2013. *South China Sea. United State Energy Information Administration.*
- IKA UNHAN. 2018. *TNI AL Sukses Selenggarakan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018*. Lombok: IKA Pertahanan Indonesia - Australia.
- U.S - China Commission Gov. 2018. *Annual Report to Congress.*
- ADB. 2017. *Meeting Asia's Infrastructure Needs*. Asian Development Bank.
- Beckman, R. 2013. The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law* (1), 143.
- Bouchat, C. J. 2014. *The Paracel Island and U.S Interests And Approaches In The South China Sea*. United State Army War College Press.
- Cai, P. 2017. Understanding China's Belt and Road Initiative. *Lowy Institute For International Policy* , 1.
- Dipua, A. 2020. Exercise Komodo: Track II Diplomacy In The South China Sea Question. In *The Horizon: Magazine Of The Indonesian Navy* (p. 51). Jakarta Timur: Naval Information Service.
- U.S DoD. 2018. *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2018*. Department of Defense.
- Grossman, D. 2019. Military Build Up in the South China Sea. *RAND Corporation* , 1.
- Inkriwang, F. W. 2021. Multilateral Naval Exercise Komodo: Enhancing Indonesia's Multilateral Defence Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asia Affairs* , 40 (3), 422 - 433.
- Inkriwang, F. W. 2021. Recalibrating Indonesia's Defense Diplomacy for the New Normal. *The National Bureau of Asian Research* , 1 - 2.
- Kemlu RI. 2014. *Diplomasi Indonesia 2014*. Jakarta: Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Marsetio. 2014. *Manajemen Strategis Negara Maritim Dalam Perspektif Ekonomi Dan Pertahanan*. 20.



- OECD. 2018. *The Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape*. Paris, France: OECD Publishing.
- Panda, A. 2019. *“China’s South China Sea Anti-Ship Missile Tests Up the Stakes*. TheDiplomat.
- Pemprov NTB. 2018. *MNEK 2018 ANGKAT “KOMODO” KE DUNIA INTERNASIONAL*. Lombok: Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- SCMP. 2019. *Indonesia Opens Military Base on Edge of South China Sea to ‘deter security threats*. SCMP News.
- Sijabat C. A., Octavian A., & Said B. D. 2018. Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8 (2), 96.
- Sihombing, E. 2021. *Bangka Belitung Tuan Rumah Multilateral Naval Exercise Komodo 2020, Diikuti AL 54 Negara*. Bangka Belitung: iNews.
- Storey, I. 2020. The South China Sea Dispute in 2020-2021. *Yusof Ishak Institute Analyse Current Events*, 8.
- Suryadinata L., & Izzuddin M. 2017. The Natuna's: Territorial Integrity In The Forefront Of Indonesia-China Relations. *Yusof Ishak Institute*, 5, 7 - 8.
- Wibowo, M. A. 2020. *Nuansa Baru Di Balik Rapim Kemhan, TNI Dan Polri 2020*. Biro Humas Setjen Kemhan.